BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di 21 SKPD Kota Bandung dan menganalisis data serta membahas permasalahan mengenai Pengaruh Pengukuran Kinerja Terhadap Pelaksanaan *Good Public Govrnance* di Pemerintah Kota Bandung dan berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pengukuran kinerja di pemerintah kota Bandung termasuk dalam kategori Baik.
2. Pelaksanaan *good public governance* di pemerintah kota Bandung termasuk dalam kategori Baik.
3. Pengukuran kinerja mempunyai pengaruh positif yang sangat kuat terhadap pelaksanaan *Good Public Governance* yaitu sebesar 66.05 %.

Saran

Berdasarkan tujuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dibuat maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung sudah Baik. Tetapi Pemerintah Kota Bandung tidak boleh merasa cukup dengan pengukuran kinerja yang telah ada sekarang. Dalam melakukan pengukuran kinerja pemerintah kota Bandung dapat mencoba teknik pengukuran yang lain baik dengan menggunakan pengukuran yang bersifat finansial maupun *non*

finansial dengan memperhatikan hasil, manfaat dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih baik dan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat serta disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

2. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan *good public governance*, pemerintah kota Bandung harus lebih meningkatkan mutu kinerja dengan cara menyusun anggaran yang lebih mengutamakan program yang jelas capaian kinerjanya. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Sebaiknya kegiatan yang akan dilakukan pemerintah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan harus mempunyai standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut. Dengan menggunakan analisa standar belanja (ASB) pemerintah dapat menetapkan besarnya alokasi anggaran untuk setiap kegiatan dimulai dengan menganalisis beban kerja untuk setiap kegiatan. Analisis beban kerja dan perhitungan biaya per unit menggunakan indikator efisiensi dan *input* sebagai dasar perhitungan standar biaya. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan pengendalian anggaran meliputi pengukuran terhadap *output* dan belanja yang dilakukan dibandingkan dengan anggaran. Adanya perbedaan atau varians antara hasil yang dicapai dengan yang dianggarkan kemudian dianalisis agar diketahui penyebabnya dan dicari siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya varians tersebut, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.

3. Peneliti menyarankan kepada pemerintah kota Bandung untuk mempertahankan pengukuran kinerja yang telah ada karena sampai saat ini pengukuran kinerja tersebut mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan *good public governance*. Tetapi pemerintah kota Bandung tidak berarti merasa cukup dengan pengukuran kinerja yang saat ini diterapkan karena tidak menutup kemungkinan dilakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain yang bisa mempengaruhi pelaksanaan *good public governance* lebih kuat.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERPUSTAKAAN